

TESIS

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)

OLEH:

VIERY RINALDO

NIM: 2020123050



PEMBIMBING:

Prof. Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)

*(Viery Rinaldo, 2020123050, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2022)*

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang prosedur eksekusi pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam perkara Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 2) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, dikaitkan dengan prosedur eksekusi Jaminan Fidusia. 3) Untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan metode dan pengumpulan data secara studi pustaka dan dengan prosedur pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: Pada rumusan masalah 1. Proses eksekusi yang telah dilakukan oleh pihak tergugat terhadap pihak penggugat telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 2. Proses Eksekusi yang telah ditetapkan hakim berdasarkan putusan pengadilan haruslah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena tidak adanya kesepakatan dengan tidak di tanda tangannya berita acara serah terima kendaraan (BASTK) yang mana sudah tidak memenuhi unsur eksekusi yang diatur dalam putusan MK.

Kata kunci: Fidusia, eksekusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

OBJECT EXECUTION FIDUCIARY GUARANTEE POST DECISION
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PUU-XVII/2019

(CASE STUDY DECISION NUMBER : 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)

(Viery Rinaldo, 2020123050, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2022)

ABSTRACT

This thesis discusses the execution procedure after the issuance of the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. The problem discussed in this research is How is the Execution of Fiduciary Guarantees After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and How the Judge Considers in Cases of Execution Fiduciary Guarantee After Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The objectives to be achieved in this research are as follows: 1) To find out the Execution Procedure for Fiduciary Guarantee Objects after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. 2) To find out the Judge's Considerations in Decision Number 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, associated with the Fiduciary Guarantee execution procedure. 3) To find out the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 for the Padang District Court decision Number 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg. This research was conducted using a normative juridical problem approach. Sources and types of data used are primary and secondary data. With methods and data collection by means of literature study and with data processing procedures through data selection, data classification, and data compilation. Data analysis used is qualitative analysis. The results of the study show that: In the formulation of the problem 1. The execution process that has been carried out by the defendant against the plaintiff has violated the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 2. The execution process that has been determined by a judge based on a court decision must be based on a decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, which became the judge's consideration because there was no agreement by not signing the minutes of vehicle handover (BASTK) which did not fulfill the elements of execution stipulated in the Constitutional Court's decision.

Keywords: Fiduciary, Execution, and Judgment Constitutional Court